

UNLAM MENCARI REKTOR YANG MUMPUNI

Editor:
Mukhtar Sarman
Kata Sambutan:
Ketua IKA UNLAM

Diterbitkan atas kerjasama
Harian Banjarmasin Post
dan
Program Magister Sains Administrasi Pembangunan
Universitas Lambung Mangkurat
2014

© Mukhtar Sarman

UNLAM MENCARI REKTOR YANG MUMPUNI

Edisi Khusus: Juli 2014

Pengetik naskah
Noorma Yurianty

Layout
Yudhistira Nugroho

Diterbitkan atas kerjasama:

Harian Banjarmasin Post

dan

*Program Magister Sains Administrasi Pembangunan
Universitas Lambung Mangkurat*

Dicetak oleh:

PT Grafika Wangi Kalimantan.

Daftar Isi

Kata Sambutan ~ [i]	
Kata Pengantar ~ [iii]	
Prolog ~ [1]	
Muhammad Handry Imansyah	
<i>Unlam Mencari Rektor</i> ~ [9]	
Ersis Warmansyah Abbas	
<i>Membangun Sistem Kemajuan Unlam</i> ~ [17]	
M. Ahsin Rifa'i	
<i>Menanti Pemimpin Unlam Yang "Gila"</i> ~ [25]	
Saladin Ghalib	
<i>Tipologi Karakter Kepemimpinan Unlam</i> ~ [33]	
Wahyu	
<i>Pimpinan Perguruan Tinggi Harus Mumpuni</i> ~ [39]	
M. Kustan Basri	
<i>Tidak Perlu Gila</i> ~ [47]	
Rusdi HA	
<i>Sosok Rektor Unlam Yang Diinginkan</i> ~ [53]	
M. Ahsin Rifa'i	
<i>Siap Menang Siap Kalah</i> ~ [61]	
Epilog ~ [67]	

Lampiran: Universitas Lambung Mangkurat dari Masa Ke Masa

Kata Sambutan

Seakan-akan sebuah tradisi, setiap 4 tahun sekali warga Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) diramaikan dengan wacana pergantian pimpinan universitas. Hal itu dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, hal itu menunjukkan kecintaan warga (*civitas akademika*) Unlam terhadap pimpinannya. *Kedua*, warga kampus merasa berkepentingan terhadap proses suksesi dalam kaitan apa yang diperbuat pimpinan Unlam itu kedepan.

Bagi alumni Unlam, keterikatan dengan dunia kampus sebenarnya lebih banyak terkait dengan kenangan nostalgia. Karena itu mereka relatif tidak memiliki informasi mutakhir perihal “bekas kampusnya”, kecuali melalui pemberitaan media televisi dan surat kabar. Kalau kegiatan kampus banyak diberitakan, mereka akan banyak mengetahui perkembangan dan kemajuan bekas kampusnya. Tetapi kalau sebaliknya, misalnya kegiatan kampus hanya menyangkut rutinitas pembelajaran tanpa prestasi lain yang membanggakan, dan patut diberitakan, maka otomatis para alumni pun kehilangan berita tentang bekas kampusnya itu. Di sinilah saya kira pentingnya pengelola universitas menghimpun segala sumberdaya agar Unlam bisa berprestasi, dan patut diberitakan melalui media massa.

Saya sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Lambung Mangkurat menyambut baik gagasan Saudara Mukhtar Sarman yang menghimpun opini tentang Rektor Unlam yang pernah dimuat *Harian Banjarmasin Post*. Paling tidak hal itu sebagai bentuk kecintaannya pada kampus Unlam, dan kebetulan tempat dia bekerja sebagai staf pengajar. Harapan saya, alangkah baiknya apabila dokumenatasi Saudara Mukhtar Sarman ini dapat jadi pengingat pejabat Rektor Unlam yang terpilih, bahwa banyak harapan dan keinginan yang yang dititipkan oleh civitas akademika Unlam kepadanya.

Banjarmasin, Juli 2004

HG. Rusdi Effendi, AR

Kata Pengantar

Opini yang dimuat di surat kabar adalah tulisan pendek yang harus disikapi sebagai gagasan yang orisinal, meski tidak bisa dikategorikan sebagai tulisan ilmiah. Di antara warga civitas akademika Unlam, beberapa orang telah berinisiatif menawarkan gagasannya tentang figur Rektor yang dibutuhkan oleh Unlam. Wacana yang berkembang melalui *Harian Banjarmasin Post* itu menurut saya sayang sekali kalau dibiarkan terserak dan tidak terdokumentasikan. Paling tidak, gagasan-gagasan orisinal itu mestinya jadi bahan pertimbangan bagi Rektor Unlam terpilih untuk mengambil kebijakan dalam rangka memperbaiki dan memajukan Unlam.

Saya tidak dalam kapasitas untuk menilai isi tulisan yang ditulis oleh pakar dan pemikir Unlam itu. Tapi untuk menjadikan kumpulan tulisan tersebut menyatu dalam tema buku ini, tentu saja saya terpaksa mengedit seperlunya, tanpa menghilangkan substansinya, agar antara tulisan yang satu dengan lainnya bisa “nyambung”. Untuk itu saya mohon dimaklumi oleh para penulisnya.

Atas terbitnya kumpulan tulisan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada HG Rusdi Effendi HR sebagai pimpinan *Banjarmasin Post* dan sekaligus Ketua IKA Unlam yang telah memfasilitasinya. Dan harapan saya, semoga buku kecil ini dapat dimaknai sebagai sumbangan pemikiran bagi kemajuan Unlam ke depan.

Banjarbaru, Juli 2014

MUKHTAR SARMAN

Prolog

Ada pertanyaan klasik, tapi kerap dilupakan jawabnya, Universitas itu lembaga apa, kenapa ia (mesti) ada, untuk siapa ia ada, bagaimana mengelolanya, dan siapa yang paling berhak (mengaku) memilikinya?

Kalau kita mengulik Wikipedia, mengacu pada definisi Encyclopedia Britannica kata *universitas* berasal dari bahasa Latin *universitas magistrorum et scholarium*, yang berarti "komunitas guru dan akademisi". Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian, yang memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang. Sebuah universitas menyediakan pendidikan sarjana dan pascasarjana.

Kalau kita ikuti definisi itu, tentulah kita sepakat bahwa universitas adalah spesifik merupakan lembaga pendidikan dan penelitian saja. Lalu bagaimana dengan tugas "pengabdian masyarakat" yang merupakan bagian inheren dari Tri-dharma Perguruan Tinggi di Indonesia? Pertanyaannya, apakah mengajar dan membuat pintar mahasiswa itu bukan merupakan tugas pengabdian kepada masyarakat? Apakah penelitian yang hasilnya untuk pengembangan masyarakat atau meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan sebuah pengabdian kepada masyarakat? Sayangnya komponen pengabdian kepada masyarakat itu harus terstruktur alias sejjin penguasa kampus. Kalau tidak, tidak akan diakui. Kalau tidak diakui, tidak akan bisa digunakan untuk KUM naik pangkat.

Mungkin ada yang bertanya iseng, memangnya pangkat masih dibutuhkan dalam dunia akademik? Ya dan tidak. Ya, kalau akademisi dalam kampus itu ingin meraih karir. Tanpa pangkat yang tinggi tidak mungkin seseorang bisa jadi pejabat struktural, seperti Rektor misalnya. Mereka yang bingung mungkin ingin bertanya lagi (tanpa iseng), jabatan struktural kenapa harus dikejar-kejar oleh akademisi yang sejatinya punya tugas fungsional? *Wallabualam*. Tapi bagi yang tidak kepingin berkarir jadi pejabat struktural memang tidak penting benar soal pangkat itu.

Kembali ke definisi universitas sebagai "komunitas guru dan akademisi", status "guru" dan "akademisi" tampaknya memang tidak menyentuh ihwal pangkat. "Guru" bertugas mengajar. Akademisi bertugas meneliti. Namun kasus di Indonesia agak unik. Guru yang mengajar di kampus disebut dosen. Sedangkan dosen yang terhormat disebut "guru besar". Guru besar itu tidak lain "jabatan" pula adanya. Dibutuhkan KUM minimal 850 untuk status jabatan guru besar itu. Tidak akan KUM 850 itu

diakui apabila tidak ada komponen pengabdian kepada masyarakat. Dan nilai sebesar KUM 850 itu acapkali hanya bisa dipenuhi apabila seseorang rajin bertindak sebagai akademisi, misalnya melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Itulah sebabnya, guru besar yang mumpuni seharusnya seorang “guru” yang rajin meneliti dan mempublikasikan karya-karya ilmiahnya.

Tetapi untuk mendapatkan status sebagai guru besar itu masih ada syaratnya lagi. Yang bersangkutan harus telah berstatus Doktor. Status apakah itu? Doktor adalah jenjang pendidikan formal tertinggi dalam dunia akademis. Tetapi, lagi-lagi di Indonesia agak unik pemahamannya tentang status akademis yang satu ini. Konon, doktor yang diakui untuk naik pangkat (baca: KUM-nya) adalah yang disiplin ilmunya linier alias lurus dan sejenis sejak S1, S2 dan S3. Seolah-olah pemilikan ilmu itu harus tidak boleh berubah bagaikan sebuah kepercayaan agama. Aneh? Mungkin. Tetapi yang jelas, penilai KUM tidak akan menerima gagasan bahwa ilmu seorang Doktor itu adalah inter-disiplin atau malah (kalau sanggup) multi-disiplin. Pejabat administratif yang mengurus kenaikan pangkat benci dengan ketidaktaatan asas. Jadi kalau seorang akademisi status Dokornya ingin diakui (dan dapat digunakan sebagai KUM naik pangkat), haruslah disesuaikan dengan disiplin ilmu sebelum jenjang S3-nya. Jadi, terserah anda, kalau mau dihargai naik pangkat dengan kedoktorannya, ikuti aturan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa, tapi agak sulit urusan naik pangkatnya. Dan Doktor yang tidak naik-naik pangkat jangan bermimpi jadi “guru besar” di Indonesia. Atau jadi Rektor.

Soal Imbalan

Jadi dosen atau guru yang mengajar di perguruan tinggi di Indonesia sekarang kalau boleh jujur “agak munafik” dengan statusnya. Ada ungkapan, bahwa “Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa”, lantaran mengajar tulus ikhlas tanpa pamrih. Menurut saya, ungkapan itu adalah ungkapan sarkastik. Ungkapan itu lahir dari kondisi kurangnya penghargaan masyarakat (dan pemerintah) terhadap status “guru”, terutama dalam konteks kesejahteraannya. Guru di banyak levelnya, cenderung miskin, namun dibayangkan idealis. Guru itu tidak perlu berharta, tetapi harus kaya ilmu.

Kembali ke soal dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi, boleh saja diandaikan idealis. Tapi idealis tidak ada hubungannya dengan kemiskinan. Dosen itu harus berlangganan koran dan jurnal ilmiah

(untung sekarang sudah ada internet, dan banyak jurnal yang tidak terlalu baru ternyata bisa di-*download* secara gratis), supaya jangan ketinggalan berita populer dan ilmiah. Dosen juga perlu beli referensi terbaru, dan sekarang ini untuk klasifikasi *textbook* lumayan mahal. Dosen (tertentu) merasa berkepentingan juga ikut seminar dan konferensi ilmiah di banyak tempat yang perlu ongkos. Dan lain-lain. Apalagi dosen itu juga manusia yang perlu makan-minum-pakaian-dan kendaraan. Bagaimana kalau dosen yang bersangkutan miskin adanya? Saya kira, (maaf) dosen yang miskin karena merasa harus idealis itu kalau tidak tolol tentu tidak kreatif.

Pemerintah cukup paham dengan kondisi itu, dan lalu memberikan berbagai tunjangan kepada dosen. Ada tunjangan fungsionalnya sebagai dosen. Ada tunjangan sertifikasi dosen. Ada tunjangan jabatan guru besar. Ada tunjangan melaksanakan tugas tambahan (misal sebagai Dekan *atama* Rektor). Dengan berbagai macam tunjangan yang diberikan pemerintah itu sebagian besar dosen jelas lebih tertolong dari kemiskinan. Tetapi ihwalnya kembali kepada persoalan administrasi. Tanpa kemampuan mengumpulkan KUM dalam jumlah tertentu, seorang dosen akan tetap berada di level terendah dengan hanya menerima gaji pokok yang tak cukup untuk membiayai hidup keluarganya (kalau dosen itu misalnya berkeluarga) sebulan. Apa lacur yang terjadi, dosen-dosen yang rasional (untuk tidak menyebut pragmatis) terpaksa agak disibukkan dengan urusan mengumpulkan KUM yang menentukan pangkat dan jabatannya. Lalu tanpa disadari, idealisme sebagai “guru” pun agak sedikit terlupakan.

Dosen tertentu yang berkemampuan akademis mumpuni biasanya tertolong oleh kegiatan penelitian. Kalau boleh jujur, hanya sedikit dosen yang berprinsip “penelitian adalah untuk penelitian”. Banyak dosen (kalau tidak seluruhnya) yang gemar meneliti, juga termotivasi untuk melakukan penelitian karena bermakna proyek yang menghasilkan uang. Cuma celakanya adalah kalau dosen itu mabok proyek penelitian dan agak abai dengan kaidah ilmiah yang melakat pada diri seorang akademisi. Banyak penelitian yang dilakukannya, tapi sumbangan kepada ilmu pengetahuan minimal sekali. Pasalnya, penelitiannya berorientasi uang saja. Dan dalam kasus seperti itu, cederalah statusnya sebagai akademisi yang bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan.

Tugas Rektor

Upaya mengembalikan *marwah* Universitas adalah menyadarkan kembali sejumlah dosen yang sibuk mengumpulkan KUM dan mengejar pangkat, tetapi melupakan tugas pokoknya sebagai “guru” dan “akademisi”. Juga mengingatkan pada Guru Besar agar dapat memberikan contoh teladan jadi “guru yang baik” dan “akademisi yang produktif”. Kalau tidak, maka universitas tidak lain adalah sekadar bangunan tempat bernaung orang-orang pintar (tapi mungkin sudah tergerus idealismenya) yang tidak bermanfaat bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia.

Tanpa bermaksud menggurui, adalah tugas Rektor untuk mengembalikan fungsi Universitas kepada *kebittab*-nya seperti itu.**

Unlam Mencari Rektor¹

Oleh

Muhammad Handry Imansyah²

Judul tulisan ini pernah penulis gunakan sekitar 1990-an menjelang pemilihan Rektor Unlam, dan diangkat judul yang sama karena persoalannya hampir sama.

Keinginan warga civitas akademika memiliki Rektor yang mumpuni bertujuan untuk melihat Unlam yang maju jajaran Universitas terkemuka di Indonesia, sesuai dengan visi Unlam. Namun, yang mesti diperhatikan adalah apakah para senator sebagai pemegang mandat seleksi calon Rektor tersebut sejalan dengan warga kampus yang ingin melihat Unlam menjadi Universitas yang terkemuka, tidak hanya di Kalimantan Selatan, tetapi di Indonesia dan minimal di ASEAN.

Jika posisi Unlam yang terbelakang di jajaran Universitas saat ini, tentunya mensyaratkan pemimpin dengan mental berani. Bagi Unlam diperlukan kebijakan lompatan besar (*quantum leap*), bukan kebijakan yang biasa-biasa saja. Kebijakan yang biasa-biasa saja, hasilnya pun akan biasa-biasa saja, yang berarti nol bagi resultan kemajuan Unlam. Lompatan besar itu tentu tidak mudah, oleh karena itu Rektor mendatang harus yang paling paham dalam menentukan fokus kebijakan.

Harus disadari bahwa Universitas itu adalah lembaga yang berbasis sumber daya manusia (SDM). Terobosan dalam pengelolaan SDM merupakan suatu keharusan, karena pada merekalah Unlam bergantung. Salah satu unsurnya adalah peran para dosen yang menjadi ujung tombak dan membuat Unlam dapat dikenal luas melalui kiprahnya.

Diantara langkah strategis yang perlu ditingkatkan, kedepannya adalah secara efektif memberikan insentif dengan sistem dan besaran yang pantas kepada para dosen yang telah berkiprah melalui tulisan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional serta juga menulis buku yang diterbitkan oleh penerbit ternama. Jika para dosen berkarya lebih banyak,

¹Dimuat *Harian Banjarmasin Post* tanggal 17 Mei 2014.

²**Dr Muhammad Hadry Imansyah** adalah Dosen FEB Unlam, dan anggota Forum Ekonomi Regional untuk Menteri Keuangan.

maka Unlam akan makin dikenal luas. Selain itu dengan fasilitasi yang transparan, para dosen didorong untuk menyajikan hasil karya penelitian di berbagai forum ilmiah sebagai penyaji pada level nasional dan internasional. Cara ini sekaligus memudahkan administrasi karya-karya ilmiah para dosen yang selama ini menjadi persoalan. Dengan semakin banyak dosen yang menyajikan paper pada tingkah internasional maka Unlam akan makin dikenal.

Para dosen yang baru dapat gelar doktor perlu didorong untuk mendapatkan *postdoctoral*, dalam upaya menjalin *network* dengan universitas-universitas ternama. Dosen-dosen yang memiliki kualifikasi internasional harus diizinkan bahkan dianjurkan, dan bukan justru dilarang, untuk menjadi *visiting professor* di Universitas luar negeri. Dengan demikian, SDM yang dimiliki Unlam akan meningkat dan diakui setara dengan berbagai Universitas terkemuka di dalam dan luar negeri. Ini meningkatkan potensi kerjasama lebih luas baik di bidang penelitian maupun belajar mengajar.

Untuk meningkatkan jumlah dosen yang bergelar doktor, maka universitas perlu memiliki sistem yang terencana dan sistematis. Termasuk dalam persiapan seleksi ataupun selama prosesnya, sehingga dapat bersaing untuk mendapatkan berbagai sumber beasiswa.

Kendala Anggaran?

Untuk melakukan lompatan besar, anggaran seringkali dijadikan kambing hitam, tetapi tidak bagi pemimpin yang bermental berani. Sudah saatnya perencanaan anggaran didesentralisasikan hingga pada tingkat program studi atau jurusan. Sebab pada pada program studi dan jurusan inilah yang paling mengerti kebutuhan pengembangan pada level personal.

Anggaran berbasis kinerja (ABK) seharusnya sudah diimplementasikan di lingkungan kampus. Unlam dan beberapa fakultas pernah menerapkan ABK ketika mendapatkan hibah-hibah seperti DUE, QUE dan TPSDP. Seharusnya kesinambungan implementasi sistem ABK ini terus dipelihara, bukan hanya saat hibah saja. Dari sisi kinerja, indikator *output* dan *outcome* harus benar-benar dikawal dalam menuju visi sebagai universitas terkemuka. Peranan Universitas hanya mengkoordinasikan, menyingkronkan, dan menyinergikan program antar level di lingkungan Unlam.

Pendanaan dengan APBN jelas tidak mencukupi untuk melakukan lompatan besar. Untuk itu diperlukan pemikiran alternatif yang *out of the*

box guna mendapatkan sumber pendanaan di luar APBN. Berbagai alternatif bisa dilakukan, seperti menjalin kerjasama pemerintah dengan swasta (KPS) atau PPP (*public private partnership*), memanfaatkan dana CSR (*corporate social responsibility*) dari sektor swasta (terutama perusahaan tambang), kerjasama dengan Pemerintah Daerah, serta membuat lembaga *trust fund* (dana perwakilan) dengan sumber dana sumbangandari berbagai pihak ketiga seperti para pengusaha batubara, kelapa sawit dan PT Pertamina yang kegiatan operasi bisnisnya di Kalsel.

Dengan adanya lembaga dana perwakilan untuk pengembangan Unlam maka akan memberikan rasa percaya yang tinggi bagi para penyumbang. Hal ini sudah dilakukan oleh FE UGM yang membangun gedung dengan pendanaan oleh Pertamina, sehingga gedungnya dinamakan Tower Pertamina. Sedangkan model PPP sudah dilakukan oleh IPB dengan Botanix Squarenya. Sementara lembaga wali amant (*trust fund*) dapat dibuat sebagai terobosan untuk pengembangan Unlamke depan sebagai tempat pengumpulan dana (*pool of fund*) dari pihak ketiga. Jadi bukan mustahil nanti ada Gedung Sulaiman HB atau pengusaha besar lainnya, karena gedungnya dibangun atas sumbangan dari mereka.

Rektor haruslah memiliki jaringan yang luas dan dikenal tidak hanya pada level daerah tapi nasional, bahkan internasional. Kalau istilah Banjar-nya, “*makin banyak baisi kawan, makan banyak jua (sumbar) rajakinya*”.

TulangPunggung

Untuk mengejar ketertinggalan Unlam, maka pengelolaan administrasi akademik dan proses belajar mengajar harus berbasis ICT (*information and communication technology*). ICT ini menjadi sangat penting bagi Unlam karena berada jauh dari pusat perkembangan ilmu dan teknologi (*remote areas*) untuk membuat dosen dan mahasiswanya tidak tertinggal informasi terbaru. Tampaknya ICT di Unlam selama ini kurang mendapatkan perhatian serius. Perkembangan ke depan, semua lembaga termasuk lembaga pendidikan akan menggunakan ICT sebagai tulang punggung pengelolaan administrasi dan proses belajar mengajar sehingga Unlam harus memberikan anggaran yang cukup memadai.

Itulah faktor faktor kunci kebijakan ke depan untuk Unlam dalam melakukan lompatan besar, karena kedua faktor kunci tersebut belum mendapatkan perhatian serius. Namun, semua itu akan terpulung kepada

sebagian besar senator, bahwa apakah memang Unlam memerlukan suatu lompatan besar (*quantum leap*)*

Membangun Sistem Kemajuan Unlam³

Oleh

Ersis Warmansyah Abbas⁴

Pembicaraan terbatas tentang siapa yang akan menjadi Rektor Unlam periode 2014-2018, sekalipun belum didiskusikan secara terbuka, menjadi topik hangat di kalangan warga Unlam. Sekalipun ada yang tidak hirau, Unlam akan dipimpin siapa. Siapa pun Rektornya, Unlam akan tetap menjadi Unlam. Tidak sedikit yang berharap, Rektor terpilih akan membawa perubahan signifikan.

Dalam balutan sarkastis, Unlam diplesetkan menjadi “universitas lambat maju”. Plesetan yang sungguh tidak nyaman. Lebih menyedihkan, sampai hari ini (saat akan terjadi suksesi kepemimpinan Unlam, *editor*), Unlam berada di posisi kasta bawah jajaran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan akreditasi C. Padahal, mayoritas program studi S1 di Unlam berakreditasi B. Semoga perolehan akreditasi Unlam secepatnya menaik menjadi B. Sebagai PTN tertua di Kalimantan tidak lucu kalau Unlam sampai dibina PTN tetangga.

Tulisan berikut bukan menilai posisi Unlam saat ini, tetapi dirakit dalam pandangan seorang warga Unlam yang meyakini, bahwa sesuai kondisi objektif, ke depan Unlam memerlukan pembangunan sistem lebih serius.

Transparan

Pertama, Rektor adalah seorang yang telah mencapai puncak pendidikan akademis, bergelar Doktor berpredikat Guru Besar. Hal ini kiranya tidak perlu dibahas, sebab cukup dengan ilustrasi, kiranya kurang nyaman Rektor menandatangani ijazah yang dikeluarkan institusi yang dipimpinnya, padahal gelar akademiknya “seadanya”.

³Dimuat *Harian Banjarmasin Post* tanggal 20 Februari 2014.

⁴**Dr Ersis Warmansyah Abbas** adalah Dosen FKIP UNLAM, dan Wakil Ketua Tim RIP Unlam.

Rezim pimpinan Unlam saat ini, terlepas ada yang mempertanyakan kinerja mereka, merupakan rezim terbagus secara akademik sepanjang sejarah Unlam. Setidaknya menginspirasi kepemimpinan lembaga-lembagadan dekan agar dijabat mereka yang profesor doktor. Katakanlah sebagai “pengakuan” dari masyarakat akademis sekaligus sebagai pemicu dan pemacu agar para dosen termotivasi mendapatkan predikat profesor. Dalam hal perolehan gelar doktordan predikat professor, capaian dosen-dosen Unlam masih jauh dari yang diharapkan. Lupakan sejenak perdebatan *leadership* sesuatu yang berbeda dengan perolehan gelar akademik.

Lajuan logikannya, saya ingin memaneh, agar rezim Unlam mendatang memprogramkan peningkatan SDM lebih serius. Selama ini banyak dosen kuliah S3 atas inisiatif sendiri. Konon, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membantu sekitar Rp 1 miliar guna membantu dosen yang kuliah S2 dan S3 setiap tahunnya. Kurang asyiknya, bantuan Pemprov yang dianggarkan untuk dosen yang kuliah S2 ada yang tidak terserap, sementara yang kuliah S3 belum terbantu. Karena peruntukan tidak tepat, sebagian bantuan tidak tergunakan.

Kedua, Rektor dan jajarannya adalah mereka yang mendayung transparansi. Sebagai ilustrasi, saya telah menjadi dosen di Unlam sudah 30 tahun, sampai hari ini tidak pernah melihat “RAB (Rancangan Anggaran Biaya) Unlam”. Lebih lucu lagi, beberapa program studi di FKIP Unlam, meminta agar saya mengusahakan membuka “RAB Unlam”. Apa pasal?

Rupanya mereka tahu saya ditugaskan sebagai wakil Ketua Tim Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unlam yang tidak ada sangkut pautnya dengan “RAB Unlam”. Kepada Prof. Jumadi hal tersebut telah saya sampaikan. Menurut PR II Unlam tersebut, keterbukaan satu diantara kebijakan Rektorat dan fakultastelah di minta membuka RAB masing-masing secara transparan. Entahlah.

Yang pasti, keinginan ketua program studi sederhana saja. Mereka membuat RAB program studi yang diajukan ke fakultas untuk diteruskan ke Unlam. Nah, program apa saja yang disetujui, dan berapa dananya dan program mana yang tidak disetujui. Sangat sederhana. Agar, ya....agar mereka bisa bekerja sebagai mana yang direncanakan.

Sejujurnya, saya terheran-heran mengetahui hal tersebut. Tidak mampu mereka-reka bagaimana program studi bekerja selama ini. Bahkan, (awalnya) tidak percaya kalau program studi tidak tahu program apa saja dari program mereka yang telah disetujui. Berdasarkan RAB tersebutlah

program studi dapat mengembangkan dan melaksanakan program-program yang direncanakan. Kalau tidak, mereka akan terjebak melakukan pekerjaan rutin seperti melaksanakan perkuliahan.

Ketika mendiskusikan secara serius, bahkan dengan seorang petinggi provinsi ini, membuat dia geleng-geleng kepala. Sembari bercanda dia berkata, “kalian saja yang tidak peduli sehingga RAB Unlam saja tidak tahu”. “APBD Kalimantan Selatan bisa dipantau melalui internet”, katanya dengan serius sembari bercanda.

Ketiga, Unlam konsern soal IT. Sejak era kepemimpinan Pak Alfian dan Pak Rasmadi, saya tidak abai menyampaikan, agar Unlam mengurus secara profesional soal IT. Ketika melakukan studi banding ke Unand Padang dan UNP Padang, yang mahasiswanya dua kali lipat mahasiswa Unlam, mereka mampu mengembangkan IT sehingga proses administrasi diPTN tersebut sangat memudahkan. Mohammmad Ary, Ketua BAPSI Unlam sampai berkata: “Pak Ersis, mimpi saya hanya satu. Sebelum pensiun, saya ingin seluruh proses administrasi serba ITditerapkan di Unlam. Dua tahun lagi saya pensiun”.

Saya nyengir saja. Hal tersebut sudah kami bicarakan 10 tahun lalu. Ibarat perjalanan, Unlam berjalan bak kura-kura. Sejujurnya, saya tidak yakin, ketika Ketua BAPSI Unlam pensiun, Unlam sudah begitu hebat memanfaatkan IT. Melihat kondisi Unlam saat ini, sebelum Ary pensiun saya tahu diri, saya tidak pantas sebagai Wakil Ketua Tim RIP Unlam.

Keempat, kampus Unlam. Diskusi panel yangdigelar Tim RIP Unlam dengan Bappeda Kalsel, BPS, instansi terkait sampai ahli tata kota, dan saya kebetulan sebagai moderatornya. Saya sampai pada kesimpulan: 10-20 tahun ke depan, Unlam akan menjadi kontributor beban kepada Banjarmasin, yang daya dukungnya saat itu sangat berat sebagai satu dari sekian kota terpadat di dunia. Dengan kata lain, unlam harus pindah. Setidaknya, Unlam membangun kampus pusat baru, dan dengan kampus pusat mengembangkan “kampus daerah” bukan seperti saat ini dengan kampus “bertebaran”.

Saya pikir, Unlam perlu merencanakan keberlangsungannya untuk seabad ke depandalam semangat pengembangan jangka pendek yang tidak kalah pentingnya. Dengan kata lain, diperlukan perencanaan komprehensif. Sejauh yang saya perhatikan, Unlam sedang hobi-hobinya melakukan MoU dengan berbagai pihak sebagai permulaan yang bagus.

Yang diidamkan, realisasinya. Ruh Unlam adalah ruh tiga pilar Tridharma PT, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Primus Inter pares

Mengakhiri tulisan ini, bagi saya sesungguhnya tidak penting siapa yang memimpin Unlam. Sebab, yang lebih utama adalah membangun sistem. Selama landasan sistem belum kokoh, tidak akan mantap diterapkan (dan dikembangkan), dan kita akan terjerembab pada sandaran, bahwa segala sesuatu ditentukan oleh siapa yang memimpin. Terlepas, pada katup-katup tertentu ada benarnya.

Lembaga yang menyandarkan harapan kepada pemimpin, akan tergantung kepada pemimpin tersebut. Karena itu, pembangunan dan pengembangan sistem akan mengalami involusi. Sesuai perkembangan zaman, kepemimpinan berlandaskan *primus inter pares* bukanlah andalan saat ini. Sebab, kita tidak dalam sistem masyarakat tribal.

Membangun sistem adalah kunci kemajuan Unlam. Membangun sistem memerlukan sumbangan potensi dan keberdayaan warga Unlam. Pemberdayaan merupakan tugas seorang Rektor.**

Menanti Pemimpin Unlam yang “Gila”⁵

Oleh

M Ahsin Rifa’i⁶

Judul tulisan ini oleh sebagian orang mungkin dianggap sangat *vulgar* dan kurang beretika. Namun, yakinlah tulisan ini hanya bermaksud memberikan masukan buat calon pemimpin Unlam masa depan. Pemimpin yang kelak dapat mengantarkan Unlam menjadi salah satu Universitas terkemuka di Indonesia dengan keunggulan spesifik di bidang pengelolaan dan pengembangan lahan basah.

Tahun ini, memang merupakan tahun politik. Semua partai politik, para caleg, dan capres sibuk menyusun strategi dan konsolidasi untuk menjadi yang terbaik. Tak terkecuali Unlam, perguruan tinggi tertua di Kalimantan ini akan melaksanakan *arub ganal* pemilihan Rektor, bulan Juli 2014.

Nuansa politik mulai terasa di mana-mana. Para kandidat dan tim sukses tampak mulai intensif meraih simpati, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Berbagai pertemuan untuk menggalang dukungan dari anggota Senat Universitas terdengar santer di seantero Unlam. Beberapa profesor telah menunjukkan keinginannya menjadi kandidat, meskipun belum dideklarasikan. Diskusi kecil antar-pejabat, antar-dosen, antar-pegawai, dan antar-mahasiswa berlangsung di mana-mana.

Pertanyaan saya, sudahkah Unlam menjadi salah satu universitas yang maju dan terkemuka di Indonesia, sesuai visi yang dicanangkan hingga 2014 ini? Mari kita sama-sama melihat beberapa data dan fakta yang menjadi indikator kemajuan suatu perguruan tinggi.

Indikator yang paling mudah adalah menggunakan 7 Standar BAN PT. Namun jika ke-7 standar ini kita bahas, maka tulisan ini menjadi sangat panjang. Oleh karena itu saya coba menggunakan beberapa standar hasil identifikasi dan analisis yang saya ketahui. Dengan segala rasa hormat

⁵Dimuat *Harian Banjarmasin Post* tanggal 18 Februari 2014.

⁶**Dr. M. Ahsin Rifa’i** adalah Ketua Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan Unlam, dan Anggota Badan Penjamin Mutu Unlam.

dan apresiasi yang tinggi tanpa bermaksud mengenyampingkan upaya keras yang telah dilakukan oleh pimpinan Unlam saat ini, mari kita lihat beberapa fakta berikut :

Pertama, menginjak usia ke-56 tahun (berdiri 1958), Unlam telah memiliki 1.032 orang staf dosen. Dari jumlah tersebut 131 orang (12,69 persen) berpendidikan doktor dan 26 orang (2,52 persen) bergelar profesor. Prosentase ini, coba kita bandingkan dengan PTN lain yang sederajat, Unhas Makassar, yang sama-sama berada di wilayah timur. Unhas berdiri pada 1956 hanya dua tahun lebih tua dari Unlam. Mereka memiliki 657 orang dosen berpendidikan doktor dan lebih 400 orang dosen bergelar profesor dari 1.700-an jumlah staf dosen yang dimiliki. Dibidang ini Unlam sangat jauh ketinggalan dengan Unhas.

Kedua, jumlah penelitian yang dilakukan selama tiga tahun terakhir (2011-2013) berkisar 414 judul dan kegiatan pengabdian berkisar 613 judul. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang dihasilkan berkisar 20 artikel dan internasional berkisar 24 artikel. Jumlah buku teks berkisar 22 judul. Jika kita bagi rata-rata setiap tahunnya, maka dosen Unlam hanya menghasilkan karya penelitian 138 judul atau 13,37 persen, karya pengabdian 204 judul atau 19,77 persen, jurnal ilmiah nasional terakreditasi 7 artikel atau 0,68 persen, dan jurnal internasional 8 artikel atau 0,77 persen. Bandingkan dengan Unhas Makassar, pada 2013 rata-rata dosen yang melakukan penelitian mencapai 57,6 persen, pengabdian mencapai 29,1 persen. Kondisi serupa terjadi pula pada jumlah jurnal nasional, internasional, dan buku teks, termasuk jumlah Haki dan Paten. Dibidang karya ilmiah ini pun Unlam sangat jauh ketinggalan. Padahal salah satu indikator kemajuan sebuah Universitas sering dilihat dari indikator ini.

Ketiga, kerja sama dalam negeri selama tiga tahun terakhir berjumlah 133 buah dan luar negeri berjumlah enam buah. Jumlah ini jika dibandingkan dengan jumlah dosen yang dimiliki maka sangat tidak sebanding dan jauh tertinggal dengan PT lainnya.

Keempat, kemampuan ICT yang masih belum optimal, sehingga sistem informasi akademik, kepegawaian, sarana prasarana, dan keuangan belum berjalan dengan baik. Kinerja manajemen universitas dirasakan masih lemah.

Kelima, secara individu dan kelembagaan Unlam belum banyak berkiper di tingkat nasional dan internasional. Contoh yang paling sederhana adalah tidak satu pun dosen Unlam menjadi asesor BAN PT. Begitu pula *reviewer* penelitian dan pengabdian Dikti hanya hitungan jari.

Keenam, kondisi kampus yang terpisah dan berada di tengah perkotaan yang sulit untuk dikembangkan, karena terbatasnya lahan dan tingkat kemacetan yang semakin tinggi. Kondisi ini menyebabkan ketidakefektifan, banyak membuang waktu dan menguras tenaga ketika harus melakukan berbagai rapat dan koordinasi pimpinan, urusan akademik dan kemahasiswaan. Dan seterusnya.

Oleh Karena itu, jangan heran berdasarkan 100 besar peringkat PTN/PTS se Indonesia pada 2013 yang dirilis *Webometrics*, sebuah situs yang melakukan pemeringkatan Universitas-Universitas di dunia, peringkat pertama diduduki oleh UGM, disusul ITB, UI dan seterusnya. Unhas Makassar berada di urutan ke-20 sedangkan Unlam berada di urutan ke-95. Dilihat dari peringkat dunia, Unhas berada pada urutan 1.481 sedangkan Unlam berada pada urutan 5.413. Jauh berada di bawah Unhas dan beberapa PTS besar yang ada di Indonesia.

Melihat berbagai fakta Unlam saat ini, dengan meminjam istilah Pak Harto (mantan Presiden RI), maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus segera melakukan akselerasi secara progresif dengan menambah *speed* yang tinggi untuk mengejar ketertinggalan.

Jika kita tidak mampu menyamai universitas di Jawa dan Sulawesi, minimal kita dapat menjadi Universitas yang terbaik di Kalimantan. Untuk itu, kita tidak bisa lagi memiliki pemimpin yang “biasa-biasa” saja, namun kita harus memiliki pemimpin “gila” yang sanggup bekerja keras di atas rata-rata, yang mampu menjadikan kelemahan-kelemahan menjadi kekuatan dan ancaman-ancaman menjadi peluang.

Dibutuhkan pemimpin yang memiliki mimpi. Pemimpin yang memiliki *leadership* yang mumpuni. Pemimpin yang mampu bekerja siang malam dengan suatu kebijakan dan perencanaan yang strategis dan mampu melaksanakan dan mengevaluasi secara teratur dan berkesinambungan sesuai manual mutu yang telah ditetapkan. Segudang pekerjaan harus diemban. Semua itu hanya dapat dilakukan oleh seorang pemimpin yang “gila”. Gila berpikir, gila bekerja, gila berinovasi, dan gila berkreasi.

Siapakah yang paling layak dan paling berhak memimpin Unlam yang akan datang? Apakah *incumbent*? Atau kandidat baru dari golongan orang tua, orang muda, profesor doktor, laki-laki atau perempuan? Jawabannya menurut hemat saya siapa pun boleh, yang penting sanggup menjadi pemimpin yang “gila”.

Akhirnya tertitip salam buat anggota senat universitas. Nasib Unlam tergantung *pian sabarataan*. *Bubuhan pianlah* yang memiliki suara. Hak yang telah diamanahkan oleh puluhan ribu sivitas akademika Unlam. Semoga hak itu tetap amanah dan tak berubah menjadi hak pribadi. Wallahua'lam.**

Tipologi Karakter Kepemimpinan Unlam⁷

Oleh

Saladin Ghalib⁸

Hal suksesi kepemimpinan di Unlam mulai menjadi jualan informasi yang menarik, tidak saja bagi kalangan civitas akademika tetapi juga dilingkungan publik yang lebih luas. Hal ini sebetulnya mengisyaratkan kepedulian publik yang semakin tinggi terhadap eksistensi Unlam, yang selanjutnya dapat menjadi modal dasar bagi pengembangan Unlam ke depan.

Unlam memang harus dirasakan sebagai milik bersama dan kita harapkan lembaga ini dapat menjadi jargon keberhasilan pembangunan daerah atau bahkan Negara. Sebagai warga Unlam, saya merasa bersyukur terhadap fenomena kepedulian ini. Oleh karena itu, saya juga tergerak untuk sedikit memberikan sumbang saran melalui media ini.

Realitanya, secara jujur harus diakui bahwa Unlam memang ketinggalan pada berbagai sektor jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Namun demikian, kondisi seperti ini tidak harus membuat kita pesimistis untuk pengembangan Unlam ke depan, karena Unlam memiliki potensi yang sangat berlimpah.

Dalam sebuah forum resmi yang dihadiri oleh kolega dari perguruan tinggi lainnya di Indonesia, saya pernah mengemukakan bahwa Unlam akan menjadi Universitas terkemuka di Indonesia, bahkan dikawasan Asean, seandainya lembaga ini mendapatkan institusional *fee* cuma seribu rupiah dari setiap ton batubara, yang berhasil diproduksi di wilayah Kalimantan Selatan yang kita ketahui jumlahnya mencapai ratusan ribu ton per tahunnya.

Jika potensi seperti di atas (dari sekian banyak potensi lainnya) yang dimiliki Unlam dapat disulap menjadi efektif, maka beberapa kelemahan dilembaga ini akan segera dapat menjadi keunggulan yang sulit untuk ditandingi oleh perguruan tinggi lainnya. Apa yang dikeluhkan kolega saya,

⁷Dimuat *Harian Banjarmasin Post* tanggal 24 Februari 2014.

⁸**Dr Saladin Ghalib** adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unlam.

Dr. Ersis Warmansyah Abbas tentang banyaknya dosen Unlam yang membiayai diri sendiri demi perolehan gelar Doktor, insyaallah tidak akan terjadi lagi. Unlam pasti segera menjadi institusi yang terbanyak memiliki tenaga Doktor.

Dari andai-andai di atas, saya cukup setuju dengan tulisan kolega saya lainnya yaitu Dr. M. Ahsin Rifa'i, yang mengisyaratkan diperlukannya seorang pemimpin yang “gila” untuk membangun Unlam dari ketertinggalan selama ini.

Tulisan ini tidak menafikan pendapat bahwa sistem merupakan sesuatu yang urgen untuk pengembangan Unlam. Tetapi untuk suksesi kepemimpinan Unlam sekarang ini ada sesuatu yang lebih penting lagi yaitu: “*The man behind the system*”. Jadi, jika bicara prioritas, saya lebih mengutamakan “*leadership*” ketimbang “*system*”, dengan asumsi bahwa pemimpin yang ideal bukan cuma bisa menjalankan sistem, tapi lebih jauh dapat menciptakan atau paling tidak menciptakan sistem yang lebih kondusif.

Dengan alur pemikiran seperti diatas saya memberanikan diri untuk mengemukakan beberapa tipologi karakter pemimpin Unlam yang akan datang, seperti berikut:

Pertama, memiliki integritas yang tinggi. Syarat karakter seperti ini merupakan harga mati, karena pemimpin yang tidak memiliki integritas mustahil dapat mewujudkan mimpi-mimpi indah kita menjadi kenyataan.

Kedua, memiliki nyali yang tinggi dalam setiap keputusan, khususnya dalam memperbaiki sistem organisasi yang dirasa sudah tidak layak dan “*out of date*” dalam bingkai aturan formal yang ada. Lebih ideal lagi jika ada aturan dari atas yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian Unlam dan dunia pendidikan pada umumnya, seorang Rektor harus berani mengajukan rekomendasi guna peninjauan kembali aturan tersebut. Untuk hal ini, seorang Rektor memiliki kemudahan yang banyak, antara lain dengan menggunakan forum Rektor seluruh Indonesia yang secara periodik selalu dilaksanakan.

Ketiga, memiliki kecakapan komunikasi dan *human relation* yang tinggi, baik kepada warga di lingkungan kampus maupun kepada *stakeholder* lainnya di lingkungan eksternal kampus. Kemampuan seperti ini besar sekali dampaknya dalam menciptakan kebersamaan dan jiwa korsa terhadap Unlam dan dalam menciptakan *quality of work life* di lingkungan dalam organisasi. Kemampuan seperti ini sekaligus akan meredam konflik

internal yang biasanya muncul pasca pemilihan Rektor, serta dapat mengurangi jurang konflik antara tujuan personal dan tujuan organisasional.

Keempat, seorang Rektor harus memiliki profesionalitas yang mumpuni dalam aspek manajerial. Predikat dan gelar Profesor dan Doktor bagi seorang Rektor memang sesuatu yang ideal, karena sedikit banyak bisa memberikan keyakinan terhadap publik. Tetapi, yang lebih penting lagi harus memiliki kompetensi yang kuat dalam aspek manajerial. Saya pernah mendengar penuturan seorang kolega yang menceritakan adanya salah satu Universitas di Australia yang menyewa seorang akuntan profesional dari luar kampus sebagai pemimpin, karena universitas yang bersangkutan sedang terbelit dengan masalah sistem keuangan.

Last but not least, Rektor yang akan datang diharapkan bisa memiliki kepekaan terhadap aspirasi yang berkembang dikalangan interval warga kampus sebagai *stakeholder* yang utama. Khusus untuk ini, dalam rapat senat Unlam yang diselenggarakan baru-baru ini, saya mengusulkan agar dalam pemilihan yang akan datang ada sesi khusus di mana para Dekan di lingkungan Unlam diberi kesempatan untuk secara bergantian menyampaikan pidato yang memuat aspirasi dari warga fakultasnya masing-masing.

Pidato aspirasi para Dekan tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam pidato program masing-masing bakal calon Rektor. Penilaian terhadap masing-masing kandidat akan dinilai dari kecocokan antara pidato aspirasi kandidat dengan aspirasi warga fakultas.

Akhirnya, karena suksesi kali ini merupakan hal yang sangat strategis bagi pengembangan Unlam ke depan, dengan semangat *waja sampai kaputing*, marilah kita sama-sama berusaha dan berdoa agar Unlam mendapatkan sosok pemimpin yang ideal. *Walabualam bisawab*. **

Pimpinan Perguruan Tinggi Harus Mumpuni⁹

Oleh

Wahyu¹⁰

Dewasa ini Perguruan Tinggi (PT) dituntut untuk secara terus menerus menjadi motor transformasi, dalam dinamika perubahan yang berlangsung sangat cepat. Agar dapat mewujudkan hal tersebut, PT harus peka terhadap segala bentuk perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai tanggung jawab sosial atas keberadaannya.

Kalau kita cermati dari waktu ke waktu, PT di Indonesia jumlahnya bertambah banyak. Hal ini bisa dimengerti, karena peran pendidikan diakui dalam mencerdaskan bangsa. Dari berbagai pengalaman terbukti bahwa bangsa yang cerdas cenderung dapat membawa kesejahteraan bangsanya dan juga mampu meningkatkan daya saing bangsanya. Oleh karena itulah pemerintah memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berperan dalam upaya mencerdaskan bangsa ini melalui pembangunan di sektor pendidikan di PT atau lembaga pendidikan tinggi lainnya.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang begitu cepat, mengikuti irama perkembangan global sekarang ini, menuntut paradigma baru dari suatu PT. Menurut Dodi Nandika dkk (2006) tuntutan kepada PT sekarang ini antara lain perlunya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (IT/ICT), produk PT yang mempunyai nilai tambah dan mampu membantu permasalahan lokal, nasional dan internasional kini semakin menguat. Pemikiran tersebut sejalan pula seperti yang dikatakan oleh Lendel (Budi Widianarko, 2014), bahwa PT dapat dipandang layaknya sebuah industri multiproduk dengan tujuh pokok, yaitu: (1) pendidikan, (2) produk budaya, (3) tenaga kerja terlatih, (4) penelitian kontrak, (5) difusi teknologi, (6) penciptaan pengetahuan baru dan (7) produk dan industri baru.

Dua pemikiran di atas memang baik dan sah saja. Namun, perlu diingat, hakikat PT jangan sampai hanya menjawab tantangan perubahan zaman. Oleh, karena itu, salah satu masalah dalam pembangunan PT

⁹Dimuat *Harian Banjarmasin Post* tanggal 13 Maret 2014.

¹⁰**Prof Dr Wahyu** adalah Guru Besar Sosiologi dan Pembantu Dekan I FKIP UNLAM.

sekarang ini, adalah bagaimana PT dengan sumberdaya yang dipunyai sekarang, justru mampu mengoptimalkan perannya untuk menjawab persoalan global, seperti yang dituliskan diatas. Untuk dapat menjawab tantangan diatas, curahan waktu dan tenaga tidaklah mencukupi, tetapi diperlukan kepemimpinan yang berkualitas.

Problema Kepemimpinan

Sebenarnya, yang jadi persoalan kepemimpinan di PT yaitu kemampuan orang memberikan kepercayaan bahwa ia dapat membawa PT-nya maju dan mencapai tujuan dengan mengajak dan memotivasi civitas akademika itu bergerak bersama-sama. Seorang Pimpinan PT membawahi akademisi, seperti guru besar, dosen, mahasiswa dan karyawan administratif, jelas sekali harus mempunyai kemampuan kepemimpinan yang mumpuni.

Tantangan paling berat sekarang ini adalah PT harus menjawab persoalan global. PT yang unggul atau berkualitas justru bergulat dengan dinamika yang cepat berubah. Ilmu pengetahuan bertambah setiap waktu, generasi baru datang dengan teknologi dan masalah yang berbeda-beda.

Di tengah dinamika atau perubahan yang begitu cepat, kita justru sulit menemukan pimpinan PT yang begitu cepat tanggap dengan perubahan tersebut. Kita justru sulit menemukan pimpinan PT yang kreatif, inovatif, inspiratif dan produktif. Semuanya hanya sibuk dengan urusan-urusan administrasi, seperti mengurus mahasiswa baru, administrasi keuangan, kepegawaian, pemilihan pimpinan PT, pengukuhan guru besar, rapat-rapat, upacara setiap bulan, upacara hari besar nasional, kegiatan-kegiatan olahraga, perlombaan seni, dan entah apalagi. Pokok pekerjaannya adalah administratif, rutin dan membuat laporan.

Dengan metode kerja seperti itu, jelas PT sulit menghasilkan inovasi, pembaharuan, apalagi mencetak agen perubahan. Di dalam PT-nya gelap gulita, yang banyak ditemuinya hanya perselisihan paham, konflik, kelompok-kelompok, politik kampus, primordial, asli bukan asli, alumni bukan alumni, latar agama, dan alokasi anggaran.

Ditemui, banyak yang menjadi pimpinan PT yang tak menguasai (ilmu) administrasi dan tidak punya kapasitas kepemimpinan memadai. Ini dapat dimaklumi karena sebagian besar mereka berasal dari bidang yang sangat spesifik, misalnya fisika, sosiologi, antropologi, ilmu politik, ekonomi, hukum dan kedokteran. Akibatnya, begitu menjadi Pimpinan PT, mereka dengan mudah masuk perangkap. Sebab, kewenangan dan

kekuasaan mereka terlalu besar, dari masalah akademik, administrasi, keuangan, sampai dengan masalah-masalah sepele semuanya menjadi urusan pimpinan PT.

Ditemui, banyak yang Pimpinan PT tentu saja akan terselamatkan kalau punya pembantu atau pembisik yang arif. Sebaliknya, pimpinan PT akan celaka dan terhina pada akhir masa jabatannya kalau pembantu dan pembisiknya adalah orang-orang oportunist, licin, nekat, hedonis, materialistis.

Kedua ini tentunya tidak boleh berlanjut. Kembalikanlah misi PT pada khitahnya, yakni: 1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tri Dharma. 3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora (Pasal 4, UUD RI, No 12 Tahun 2012). Di samping itu, juga fasilitas dan anggaran yang memadai bagi PT dalam melaksanakan misi sejatinya. Bangsa yang besar perlu ditopang PT bermutu.

Pemimpin yang Dirindukan

Secara umum peran sebuah PT adalah menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan, atau pengajaran, serta riset. Di Indonesia, tugas itu ditambah lagi dengan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga tugas yang disebut Tri Dharma PT ini pada intinya harus diwujudkan. Tetapi, perwujudannya sering menghadapi kendala. Salah satu sebabnya, tidak semua potensi di PT bisa disinergikan akibat efek samping dari pesta demokrasi pemilihan pimpinan, atmosfer akademik tidak otomatis bersih kembali, bernafas sesak, oksigen yang kita harapkan bersih masih belum bisa kita dapatkan. Sebaiknya, setelah pesta demokrasi pemilihan pemimpin selesai, maka seorang pemimpin terpilih harus segera menjadi orang kuat di PT-nya. Bukan kuat secara fisik, tetapi kuat secara karakter dan mental.

Menurut Jakob Sumardjo (2002), orang kuat mempunyai ciri-ciri: menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan tanpa pamrih, keikhlasan mengabdikan, pengorbanan, keteladanan, mempersatu, meninggalkan subjektivitas golongan, memahami isi hati yang dipimpinnya, tegas, berani karena benar. Benar karena menurut hukum, mengutamakan kepentingan

bersama, jauh dari aji mumpung, berani tidak populer, tidak ragu untuk membenarkan dan menyalahkan, tidak melihat batas-batas golongan dan kepentingan, berkuasa tapi tidak menguasai, kaya tetapi tidak memiliki, cerdas tetapi menyembunyikan kecerdasannya, berbicara melalui kerja, berprinsip tetapi terbuka, menghukum dengan menangis dan berdoa bukan untuk dirinya.

Bila kualitas pemimpin yang demikian itu terpilih menjadi orang kuat, maka PT-PT di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan kaum intelektual muda yang profesional, lebih berbudaya, lebih krisis dan dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional.**

Tidak Perlu yang “Gila”¹¹

Oleh

HM Kustan Basri¹²

Menanggapi opini tentang bakal Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang baru untuk masa tugas 2014-2018, saya sepekat bahwa Rektor baru itu diharapkan mampu membawa Unlam ke tataran yang lebih maju. Tapi, kita tidak perlu mempunyai rektor yang “gila” (sebagaimana dibayangkan oleh M. Ahsin Rifa’i). Kita membutuhkan seorang rektor yang normal, sehat rohani dan jasmani, kuat mental dan spiritual, yang mau bekerja keras untuk kepentingan lembaga, bukan untuk kepentingan pribadi. Pemimpin yang bisa memberikan suri tauladan dan tidak mengorbankan anak buah serta menjaga martabat almamater.

Kondisi *objective* Unlam sekarang ini, jauh lebih baik daripada dahulu. Dosen yang bergelar Doktor dan Magister sudah banyak dan lulusan dari Universitas terbaik pula. Demikian pula dosen yang telah mencapai jenjang tertinggi (Guru Besar) sudah lumayan. Sarana dan prasarana pendidikan dan penelitian sudah lebih baik, meskipun mungkin belum ideal. Tetapi bagaimanapun juga sumber daya itu adalah selalu terasa langka, tidak akan pernah berlimpah ruah dihadapkan kepada kebutuhan. Menghadapai kelangkaan sumber daya (*scarcity of the resources*) ini diperlukan kebijakan dalam penugasan dan penggunaannya agar didapat hasil yang optimal. Di samping itu harus mempunyai *sense of priority an urgency*. Jangan sampai ada diskriminasi *like and dislike*, dan jangan sampai terjadi pemborosan dan kebocoran, yang dapat menimbulkan depresi dan akhirnya menghilangkan *spirit*.

Unlam memang harus mempunyai orang yang seperti tersebut diatas, tapi lebih penting adalah yang rasional dan realis terutama dalam pencapaian tujuan. Kita tidak perlu beretorika seperti para motivator atau berdemagogi seperti beberapa politis. Seperti (kalau saya tidak salah baca di sebuah *leaflet* Unlam) disebutkan Unlam akan menjadi nomor 20 di Indonesia pada tahun 2020. Berarti enam tahun kedepan, Alhamdulillah kalau tercapai, tapi marilah kita pikirkan, sekarang ini kita berada di urutan

¹¹Dimuat *Harian Banjarmasin Post* tanggal 10 Maret 2014.

¹²**HM Kustan Basri** adalah Gurubesar Emiritus FE Unlam.

keberapa. Berapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang diatas kita? Kalau dengan *speed* yang sama posisi tidak akan berubah.

Masa tugas Rektor hanya empat tahun, dan kalau bertahan dapat dua masa tugas akan 8 tahun. Berarti, untuk mencapai 2020 perlu satu setengah masa tugas, untuk mencapai tempat posisi ke 20 pada tahun 2020. Perlu seorang Rektor yang agak “luar biasa” (bukan “gila”) untuk tugas tersebut.

Saya pikir supaya adil pada kawan yang akan kita beri tugas tersebut lebih baik diberikan “*road map*” tahapan pencapaian apa yang optimal dapat diselesaikan dalam masa tugas pertama, dan apa yang harus dicapai pada masa tugas kedua, sambil mengupayakan percepatan *speed* yang dimungkinkan oleh kondisi *scarcity of the resources* tadi. Karena, universitas adalah suatu “*community of the equals*” atau “masyarakat orang-orang yang setara”. Rektor adalah *Primus inter pares*, yang utama di antara sesama, bukan seorang “atasan”, karena pangkatnya bisa di bawah seorang Pembantu Rektor atau Dekan, dan kalau masa tugasnya selesai akan kembali ke tugas semula jika belum pensiun. Sehingga, sejak dulu masing-masing kolega dan hubungannya kologial.

Oleh karena itu, saya harapkan akan selalu terlaksana kolegialitas dan harmoni sesama tenaga akademik khususnya, sehingga akan terjadi *sphere* seperti sekarang ini. Besar harapan saya agar Unlam dapat dikembangkan menjadi masyarakat ilmiah yang menanggapi perkembangan ilmu secara lengkap sesuai dengan fungsinya. Juga dalam perannya sebagai mitra Pemda untuk membangun daerah.

Pada masa rektor Profesor Anwary Dilmy pada 1973 terasa sekali peran Unlam pada waktu itu, di mana insan-insan Unlam turun berkiprah dalam proses pembangunan daerah. Unlam turut aktif bersama dengan para kepala dinas dan pejabat-pejabat pemerintah provinsi menyusun Rencana Pembangunan Lima tahun ke II Daerah, setelah melalui serangkaian Seminar Pembangunan daerah dan *workshop* bersama Bappenas. Demikian juga kegiatan kemasyarakatan, terutama oleh para mahasiswa sangat *intens*, sehingga Unlam selalu berada di hati masyarakat.

Akhirnya selamat memasuki masa pemilihan. Pelihara persatuan dan rasa persaudaraan serta silaturahmi. Viva Universitas Lambung Mangkurat sebagai *magistorum et scholarium*. Saya tetap bangga padamu.**

Sosok Rektor Unlam Yang Diinginkan¹³

Oleh

Rusdi HA¹⁴

Muhammad Handry Imansyah (MHI) pada 17 Mei 2014 menulis di kolom opini *Harian Banjarmasin Post* tentang kriteria calon Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang pas. Tulisannya melengkapi kriteria calon Rektor yang ditulis oleh M Ahsin Rifa'i dan Ersis abbas Warmasyah sebelumnya. Apa yang ditulis MHI tentang Unlam, memang suatu kenyataan yang terpaksa diterima.

Secara umum posisi Unlam terhadap Universitas-universitas di Pulau Jawa memang sulit disejajarkan. Dulu, posisi Unlam terhadap beberapa Universitas di pulau Sumatera seperti Unila (Lampung) dan Unsyiah (Banda Aceh), dan dipulau Kalimantan seperti Untan, Unpar dan Unmul, mungkin masih kira-kira sejajar. Bagaimana sekarang?

Rasa-rasanya hanya terhadap Universitas Palangkaraya saja lagi yang masih berani menganggap'adik'. Bahkan, dengan Universitas Borneo di Tarakan, yang baru beberapa tahun ini dijadikan Universitas Negeri, Unlam harus berhati-hati. Kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan Unlam akan disalip mereka.

MHI menitikberatkan pentingnya pengelolaan dan meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) secara berkesinambungan. Menurutnya, dengan cara pemberian *reward* terhadap SDM—dalam hal ini dosen—yang berprestasi, baik prestasi peningkatan gelar akademik, maupun prestasi lain yang bisa dibanggakan, maka akan tercipta iklim keinginan meningkat pada dosen-dosen lain. Virus *need achievement* ke setiap individu di lingkungan Unlam.

Kalau menurut MHI diperlukan lompatan besar (*quantum leap*) dalam usaha peningkatan dan pengelolaan SDM secara berkesinambungan. Dengan demikian, Unlam tentu memerlukan seorang Rektor yang visioner. Hal ini pernah penulis dengar disampaikan oleh salah satu bupati di Kalimantan Selatan. Unlam memerlukan bukan hanya

¹³Dimuat *Harian Banjarmasin Post* tanggal 29 Mei 2014.

¹⁴**Prof Dr Rusdi HA** adalah Guru Besar Teknik Sipil Fakultas Teknik Unlam.

Rektor yang menjalankan *business as usual* (BaU), tetapi yang mempunyai ide-ide besar dan keberanian menjalankannya.

Bila saran MHI menekankan pengembangan SDM, yaitu *brainware* dari suatu perguruan tinggi untuk mengejar ketinggalan terhadap rekan-rekan perguruan tinggi (PT), Unlam mungkin dapat mengurangi *gap* atau ketinggalannya, tetapi tidak akan bisa menyamai apalagi mendahului rekan-rekan PT. Hal ini karena rekan-rekan PT tersebut juga terus berkembang sedemikian rupa dengan kecepatan yang tinggi, sehingga Unlam perlu tidak hanya *quantum leap*, tetapi *greatquantum leap*.

Penulis sekarang akan coba melihat pengembangan Unlam dari arah lain. Pengembangan SDM/*brainware* seperti yang telah disarankan oleh MHI, memerlukan wadah yang baik yaitu infrastruktur kampus yang sepadan dengan SDM-nya. Apakah kampus sekarang belum baik? Kalau kita melihat kampus orang lain, ya kita merasa malu dengan Kampus Unlam.

Sekarang Unlam memang sedang berbenah. Banyak pembangunan fisik akan dilakukan. Tapi penulis merasa pembangunan itu akan menjadi sia-sia. Kampus Banjarmasin makin lama makin terendam. *Trend* ke arah itu sudah jelas kelihatan. Kita lihat saja dalam 3 atau 4 tahun kedepan. Selain itu areanya juga sudah sangat terbatas, dan dikepung oleh pemukiman dan perkantoran. Mayoritas gedung yang lama sudah terlanjur elevansinya terlalu rendah. Hanya gedung baru yang bisa dibangun agak tinggi.

Kampus Banjarbaru memang topografinya cukup baik. Penataannya juga memadai. Tetapi, masalahnya areanya mirip dengan Kampus Banjarmasin yaitu: sempit, terbatas dan dikepung oleh pemukiman.

Sejak awal berdirinya, sudah nasib Unlam mempunyai *distributed campus*, gedungkampus yang tersebar di beberapa tempat. Gedung-gedungnya tersebar dimana-mana. Kampus tersebar ini memang tidak masalah kalau manajemen pengelolaan sudah baik. Dalam hal-hal khusus, seperti Fakultas Kedokteran, memang perlu dekat dengan rumah sakit pendidikan. Tapi, kampus yang menyatu, jelas sekali lebih mudah pengelolannya.

Ini terlihat, dari beberapa kampus di Indonesia, di mana pengembangan sarana fisik mulai terbatas. Mereka berusaha mengembangkan dan menyatukan kampus ketempat yang baru. Sebagai

contoh, Universitas Indonesia yang semula kampusnya hanya di Salemba, membangun kampus baru di Depok seluas 320 ha.

Kita semua juga mengetahui, pemerintah (cq Kemdiknas) sekarang dalam rangka menunjang kemajuan bangsa, telah mendirikan dua buah Institut Teknologi, yaitu Institusi teknologi Sumatera di Lampung dan Institut Teknologi Kalimantan di Balikpapan. Kedua institut baru ini, dibina masing-masing oleh ITB dan ITS. Luas areal rencana keduanya adalah 300 ha. Hal ini kata Pak Nuh (Mendiknas), melihat pengalaman kampus ITS 180 ha, ternyata sudah terlalu padat untuk jumlah mahasiswanya 20 ribuan orang. Pembangunan kedua institut telah dimulai sejak tahun 2011 yang lalu.

Rencana kampus institut Teknologi Kalimantan yang megah di Balikpapan., membuat dosen-dosen teknik memimpikan mempunyai kampus seperti disana. Apakah Unlam tergugah membuat kampus yang baik, bagus dan megah bagi mewartidha SDM yang akan dikembangkan dengan cara yang disarankan oleh MHI? Sampai saat ini kelihatannya tidak seorang pun terpikir kearah kesana.

Kalau kita lihat potensi lahan Kalimantan Selatan, boleh dikatakan tidak terbatas. Untuk 300 hektare, yaitu 3 juta m², lahan berukuran 1,5 km x 2 km sudah cukup. Kadang ada alasan, wah nggak ada uang untuk pembebasan tanah. Padahal, Unlam banyak melakukan MoU dengan berbagai instansi, salah satunya adalah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penulis kira, Bapak Gubernur akan mudah saja membebaskan tanah dari milik negara. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan biaya untuk pemantangan lahan dan bangunan-bangunannya? MHI kemarin bilang, rekan-rekan swasta punya yang disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR). Nah, satu perusahaan dengan satu CSR dapat digunakan untuk pematangan lahan. CSR dari perusahaan-perusahaan lainnya digunakan untuk bangunan-bangunan. Ini baru untuk tahap awal saja.

Penulis berpendapat untuk mencapai cita-cita Unlam yang maju dan terpendang, Rektor Unlam yang baru seyogyanya mampu berpikir kreatif (*out of the box* menurut istilah MHI) atau berpikir menyamping (*lateral thinking* menurut de Bono). Rektor tidak sedang melakukan BaU, melewati waktu dari hari ke hari, menunggu gaji dari bulan ke bulan, kemudian melaksanakan ritual penggantian Rektor, tanpa terobosan apa-apa.

Selanjutnya untuk menunjang aktivitas tersebut, Rektor juga harus mempunyai kemampuan *softskill* seperti *leadership*, kemampuan berkomunikasi untuk membuka *networking* dan kemampuan bernegosiasi. Kampus Unlam idaman jelas tidak bisa dicapai oleh satu orang Rektor baru yang akan dipilih, tetapi merupakan pekerjaan estafet beberapa Rektor ke depan. Kalau pekerjaan estafet ini tidak dimulai oleh Rektor yang baru nanti, penulis berpendapat bahwa 10 Rektor ke depan pun kata 'Unlam' akan tetap diplesetkan "Universitas Lambat Maju" sebagaimana yang diplesetkan sekarang ini.**

Siap Menang Siap Kalah¹⁵

Oleh

M Ahsin Rifa'i¹⁶

Hiruk pikuk perpolitikan nasional dalam rangka pemilu Presiden 9 Juli 2014 terus menggelora. Tak ketinggalan media cetak dan elektronik nasional dalam pemberitaannya tampak berpihak pada capres-capres wapres yang menjadi pilihan pemilikinya. Kampanye hitam, kampanye putih, dan kampanye resmi yang digelar KPU campur aduk menjadi suatu turbulen yang membingungkan masyarakat Indonesia. Mana yang benar, mana yang palsu, mana yang jujur, dan mana bohong.

Kondisi serupa sedang berlangsung di kampus Unlam tercinta, meski dalam skala yang jauh lebih kecil. Nuansa politik semakin kencang dalam rangka *arub ganal* pemilihan Rektor periode 2014-2018. Patut disyukuri tahapan pemilihan saat ini, telah menetapkan 5 orang calon Rektor yang kesemuanya bergelar Profesor Doktor dari latar belakang ilmu yang berbeda.

Berdasarkan nomor urut yang telah diundi panitia, ke 5 calon tersebut adalah: (1) Prof Dr Idiannor Mahyuddin dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, (2) Prof Dr Sutarto Hadi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, (3) Prof Dr M Hadin Muhjad dari Fakultas Hukum, (4) Prof Dr Udiansyah dari Fakultas Kehutanan, dan (5) Prof Dr Lutfi Fatah dari Fakultas Pertanian.

Sebagai warga Unlam, sepatutnya kita memberikan apresiasi kepada Prof Dr Wahyu, selaku ketua panitia dan seluruh anggotanya yang telah bekerja keras menyelesaikan tahapan-tahapan pemilihan sehingga berhasil menetapkan lima calon tersebut.

Apresiasi serupa tentunya kita berikan pula kepada 5 orang calon Rektor yang telah bersedia me-*wakaf*-kan dirinya untuk memimpin Unlam empat tahun kedepan. Mengapa saya nyatakan demikian, karena 80 orang yang memenuhi persyaratan dan telah diundang panitia, hanya merekalah yang mengembalikan formulir kesediaan menjadi bakal calon

¹⁵Dimuat *Harian Banjarmasin Post* tanggal 17 Juni 2014.

¹⁶**M Ahsin Rifa'i** adalah Ketua Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Unlam.

Rektor. Selebihnya 75 orang tidak mengembalikan. Fakta ini harus menjadi komitmen kita bersama bahwa nahkoda Unlam untuk empat tahun kedepan telah percayakan kepada 5 orang putra terbaik.

Sebagai warga Unlam tentunya harus mendukung fakta ini karena itulah pilihan kita. Jika ada diantara kita yang kurang setuju dengan ke-5 orang ini, bukan saatnya lagi mengungkit-ungkit kelemahan mereka. Jika kita merasa ada orang yang lebih baik dari mereka, mengapa tidak sedari awal dicalonkan ataupun jika ada yang merasa bahwa kita jauh lebih baik, mengapa kita tidak mencalonkan diri. Saya kira banyak orang pintar dan mampu di negeri ini tetapi hanya sedikit orang yang mau dan bersedia. Apresiasi itulah yang saya maksudkan.

Dengan semangat kebersamaan dan optimisme maka saya berkeyakinan calon-calon Rektor saat ini adalah orang-orang yang terbaik. Tidak bisa dipungkiri mereka adalah orang-orang ahli atau pakar di bidangnya masing-masing. Namun untuk memimpin Unlam yang besar ini, kepakaran saja tidaklah cukup. Pimpinan Unlam harus memiliki jiwa *leadership*, *visioner*, kreatif, inovatif, komunikatif, dan mampu menjadi rektor”pekerja keras” sebagaimana yang pernah saya tulis pada kolom opini *Harian Banjarmasin Post* 18 Februari 2014.

Saya sangat bahagia tulisan tersebut mendapat respon beragam dari orang-orang terbaik Unlam kolega saya Dr Ersis Abbas Warmansyah, Dr Saladin Ghalib, dan Dr Muhammad Handry Imansyah. Tak ketinggalan orang tua, sesepuh kami Prof Kustan Basri dan Prof Wahyu turut menyumbangkan pemikirannya dalam upaya pemilihan Rektor Unlam. Semuanya berkeinginan kuat agar Unlam menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki daya saing tinggi tingkat nasional dan internasional.

Kelima calon Rektor itu telah menyampaikan pemaparan visi dan misi pada 16 Juni 2014, kemarin, sekaligus pemilihan tahap pertama untuk memilih tiga orang terbaik. Hasilnya, terpilih tiga orang calon Rektor masing-masing, Prof Dr Idiannor Mahyuddin, Prof Dr Sutarto Hadi dan Prof Dr M Hadin Muhjad.

Selanjutnya, pada pemilihan tahap kedua untuk menentukan 1 dari 3 calon harus melibatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan hak prerogatif yang dimilikinya.

Pemilihan tahap kedua akan dilaksanakan pada 16 Juli 2014. Menurut aturan, seorang menteri memiliki hak suara 35 persen dari 100

persen atau sekitar 24,63 suara dari dari total 44 orang anggota senat jika berhadir semua. Artinya, suara Menteri adalah mutlak dan sangat menentukan. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang dapat dilakukan setiap 3 calon Rektor harus mampu meyakinkan Menteri bahwa dialah yang terbaik untuk memimpin Unlam empat tahun mendatang.

Konsekuensi politik dari suatu pemilihan, tentunya pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Itu adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Bagi yang terpilih menjadi Rektor, saya kira kemenangan itu amanah yang harus dijalankan. Bagi yang belum terpilih, saya kira itu hanya kemenangan yang tertunda. Jadi, setiap calon Rektor harus siap menang dan siap kalah. Meskipun sesungguhnya tidak ada seorangpun yang dikalahkan. Ini adalah kemenangan bersama, kemenangan seluruh warga Unlam dan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.

Bagi Rektor yang terpilih harus berupaya merangkul semua pihak termasuk calon Rektor yang belum terpilih untuk bersama-sama bahu membahu membangun Unlam. Politik balas dendam dan manajemen konflik harus dibuang jauh-jauh. Tantangan Unlam dimasa yang akan datang sangatlah berat. Globalisasi dan Era Pasar bebas Asia 2015 mengharuskan kita menjadi berkualitas sehingga kita mampu bersaing ditingkat lokal, nasional dan global. Alumni yang kita hasilkan harus memiliki jiwa wirausaha yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja di daerah dan nasional bahkan Internasional.

Hasil-hasil riset yang mampu menjadi rujukan nasional dan internasional termasuk dalam mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Rektor terpilih harus mampu “berlari kencang” jika perlu “terbang” untuk menggapai angan menjadikan Unlam sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, di Asia, bahkan di dunia. Mengapa tidak?*

Epilog

Pemilihan Rektor Unlam periode 2014-2018 tinggal menghitung hari. Saat ini sudah ada 3 calon Rektor Unlam berjibaku dalam rapat Senat Universitas (bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) agar bisa terpilih sebagai yang terbaik. Tanpa bermaksud mendahului takdir, patut dipertanyakan sosok Rektor yang bagaimanakah yang dibutuhkan oleh institusi Unlam ke depan? Dari ketiga calon itu, secara formal adalah putera-putera terbaik Unlam. Betapa tidak, ketiga kandidat itu memiliki gelar akademis tertinggi, yakni Doktor dari berbagai bidang ilmu. Kecuali gelar akademis, jabatan fungsionalnya juga telah mencapai strata tertinggi, yakni Guru Besar.

Pilih yang Mana?

Dari visinya, jelas sekali semua bakal calon Rektor Unlam yang ada melihat permasalahan Unlam dari perspektif teori manajemen. Perencanaan yang baik harus dimulai dari kemampuan meramal peluang dan tantangan masa depan (*forecasting*). Gagasan yang didasarkan pada proses peramalan itulah yang biasanya menjadi visi, dan diimplementasikan kedalam sejumlah program yang telah direncanakan sedemikian cermat. Secara konseptual, sosok manajer itu melihat permasalahan dari sudut sistem. Kalau sistem berfungsi dengan baik, selesailah segala perkara.

Tetapi manajer yang baik mensyaratkan paling tidak kemampuan kerjasama tim dan kemampuan mengatasi konflik. Kemampuan kerjasama tim itu mensyaratkan bahwa manajer harus mampu bekerjasama dengan semua anggota tim (baca: kalau Rektor dengan para wakilnya dan Dekan Fakultas-Fakultas). Hal ini dikarenakan bahwa seorang manajer adalah pengantara bagi orang yang bekerja sama. Sedangkan kemampuan mengatasi konflik berkaitan dengan kemampuannya mengatasi konflik dalam institusi, apapun jenisnya. Dia harus mampu jadi penengah, bukannya merupakan bagian dari konflik itu sendiri. Kalau terjadi konflik seorang Rektor tidak semestinya berkubu atau memihak kelompok tertentu. Karena itu sedikit banyak pada diri seorang manajer itu diam-diam juga melekat syarat-syarat keterampilan memimpin.

Secara teoritis, keterampilan sebagai pemimpin adalah sangat penting. Seorang manajer harus mampu memimpin sebuah tim dalam

melaksanakan tugas mereka. Dia harus percaya diri dalam kemampuan untuk memimpin sebuah tim. Dia harus menjadi pembicara publik yang baik. Dia harus bisa mendelegasikan tugas dengan tepat dan orang akan merasa nyaman menjadi bagian darinya.

Sosok Pemimpin

Kalau mengandaikan Unlam sebagai tempat berhimpunnya civitas akademika alias warga kampus yang punya pengharapan sama untuk mencapai masa depan yang gemilang, maka tak bisa tidak, Unlam butuh sosok pemimpin. Pemimpin itu harus mampu jadi contoh teladan. Dalam hal apa? Macam-macam. Tapi minimal harus sesuai dengan ciri-ciri kampus perguruan tinggi sebagai masyarakat ilmiah yang egaliter dan sekaligus terhormat.

Tetapi ingin berargumen, bahwa mencari sosok Pemimpin yang ideal itu di masa kini sangatlah sulit dicari, tak terkecuali untuk Rektor Unlam mendatang. *Pertama*, syarat amanah misalnya. Syarat ini pada dasarnya mensyaratkan juga kejujuran alias tidak pernah dusta sehingga layak dipercaya. Apa logis syarat tersebut? Ya dan tidak. Tapi kalau saya ingin menawar, tidak usahlah yang teramat jujur serupa Nabi Muhammad. Yang cukup jujur sajalah. Atau kalau tidak, yang jarang berdusta. Atau yang lebih masuk akal lagi, yang pernah berdusta tapi tidak ketahuan publik. Dan saya yakin, itupun masih sulit dipenuhi oleh calon Rektor Unlam, kalau calon yang ada sekarang memang berani mengaku jujur menurut kata hati nuraninya.

Kedua, punya sikap tindak yang berani. Berani di sini bukan dalam arti berani berkelahi. Tapi berani mengambil risiko dan bertanggung jawab. Dalam ungkapan bijak disebutkan, tidak ada pengikut yang pengecut apabila pemimpinnya berani. Saya membayangkan, Rektor Unlam ke depan adalah sosok yang berani mengatakan “TIDAK” pada tindakan korup dan manipulasi, apapun bentuknya. Dan pernyataan anti korupsi dan tindakan manipulatif itu tidak cuma jadi pemulas bibir, tapi selalu teruji dalam tindakan.

Ketiga, punya harga diri. Tapi bukan harga diri dalam arti sempit seperti misalnya naik darah kalau merasa tersinggung.. Harga diri yang dimaksudkan disini adalah “ketersinggungan secara kelembagaan”. Saya membayangkan Rektor Unlam ke depan tidak bisa nyenyak tidur kalau Unlam tidak bisa mencapai peringkat 30 besar perguruan tinggi di Indonesia. Artinya akreditasinya harus A, jangan cuma B. Rektor Unlam harus mampu menularkan rasa kebanggaan institusional kepada segenap

civitas akademika. Hal ini penting, karena apabila segenap civitas akademika sudah merasa bangga melihat kemajuan Unlam, maka niscaya warga Kalimantan Selatan pun ikut ketularan bangga. Dengan rasa bangga tersebut, masyarakat Kalimantan Selatan pun akan menyekolahkan anak-anaknya ke universitas tertua di Benua ini, bukannya memilih universitas di pulau Jawa (yang memang terbukti selama ini lebih berkualitas dan terhormat).***

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DARI MASA KE MASA¹⁷

Universitas Lambung Mangkurat adalah Universitas tertua di Kalimantan. Universitas ini berdiri pada tanggal 21 September 1958, namun baru diresmikan pada tanggal 1 November 1960 dan berdiri sampai dengan sekarang. Lokasi kampus sempat berpindah-pindah tempat, sekarang kampus utama berada di Banjarmasin. Nama Universitas ini diambil dari nama Lambung Mangkurat, seorang patih Kerajaan Negara Dipa yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan.

Sejarah

Berdirinya Universitas Lambung Mangkurat yang biasa disingkat Unlam berawal dari Yayasan Akademi Perniagaan Kalimantan dengan Akte Notaris Nomor 24 tanggal 21 September 1956. “Akademi Perniagaan Kalimantan” (APK) kemudian didirikan atas prakarsa Milono selaku Gubernur Kalimantan pada tahun 1957. APK sendiri didirikan dengan tujuan ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan dan menyebarkan luaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berkemampuan akademik dan profesional, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa terutama di daerah Kalimantan.

Para tokoh masyarakat serta pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan pada tanggal 3 Maret-10 Maret 1957 mengadakan reuni Kesatuan tentara Nasional Indonesia Divisi Lambung Mangkurat di desa Niih, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan sekaligus membicarakan pembangunan daerah Kalimantan. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah terbentuknya Dewan Lambung Mangkurat yang di antara beberapa rencana kerjanya mendirikan sebuah perguruan tinggi di Kalimantan dengan nama Universitas Lambung Mangkurat.

Sebagai realisasi dari rencana Dewan Lambung Mangkurat tersebut, pada pertengahan tahun 1958 dibentuklah Panitia Persiapan Pembentukan Universitas Lambung Mangkurat. Pada tanggal 21 September 1958,

¹⁷Dikutip dari Website Universitas Lambung Mangkurat, 2014.

Panitia dapat meresmikan berdirinya Universitas Lambung Mangkurat (dulu disingkat ULM, sekarang disingkat Unlam) dengan Presiden Universitas (sekarang disebut Rektor) adalah Letkol. H. Hasan Basry, Wakil Presiden adalah Abdul Wabab Syahrane, dan Sekretaris Drs. Aspul Anwar. Pada mula berdirinya Universitas Lambung Mangkurat masih berstatus swasta dibawah naungan Yayasan Pendidikan Lambung Mangkurat yang pada waktu itu diketuai oleh H. Maksid (Mantan Gubernur KDH Kalimantan Selatan). Awalnya Universitas Lambung Mangkurat hanya terdiri atas Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial dan Politik, Fakultas Islamologi, serta Kursus-kursus B I dan B II. Dengan terbentuknya Universitas Lambung Mangkurat, maka tugas Panitia yang dibentuk oleh Dewan Lambung Mangkurat sudah berakhir dan selanjutnya diserahkan kepada Yayasan Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat yang didirikan dengan Akte Notaris Nomor 57 tanggal 12 Februari 1959. Serah terima ini diketahui oleh H. Maksid (Kepala Daswati I Kalimantan Selatan).

Setelah berjalan kurang lebih 2 tahun, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 41 tahun 1960 tertanggal 29 Oktober 1960, meresmikan Unlam sebagai Universitas Negeri pada tanggal 1 November 1960 yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (sekarang bernama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Pada saat diresmikan itu Universitas Lambung memiliki 4 Fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial dan Politik, dan Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian sendiri berdiri berkat kerjasama antara Yayasan Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat dan Pimpinan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor. Fakultas Pertanian Unlam secara mandiri baru berdiri pada tanggal 3 Oktober 1961 di Banjarbaru. Sedangkan Fakultas Islamologi diserahkan kepada Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1961, yang membuka cabang di Banjarmasin. Pada Perkembangannya Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta berubah menjadi IAIN Antasari. Kursus-kursus B I dan B II sendiri, melalui pertimbangan oleh Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kalimantan Selatan pada waktu itu kepada Presiden Unlam (sekarang Rektor Unlam) pada tanggal 4 November 1961 ditingkatkan menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Meski Universitas Lambung Mangkurat sudah ditingkatkan statusnya menjadi Universitas Negeri, pembiayaan untuk penyelenggaraan perkuliahan dan administrasinya tetap didanai oleh Yayasan Perguruan

Tinggi Lambung Mangkurat. Dengan bantuan tersebut banyak didatangkan dosen-dosen dari Surabaya dan Yogyakarta. Selain itu, Yayasan juga membangun gedung baru pada tahun 1960 yang berlokasi di Banjarbaru. Rencananya bangunan tersebut ditempati oleh Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial Politik, dan Fakultas Pertanian. Namun hanya Fakultas Pertanian yang menempati gedung baru tersebut, sedangkan Fakultas yang lain menyelenggarakan perkuliahan di gedung lama di Banjarmasin.

Pada tahun 1964 dibentuk Fakultas baru, yaitu Fakultas Kehutanan dan Fakultas Perikanan yang berlokasi di Banjarbaru. Sedangkan baru tahun 1965 dibentuklah Fakultas Teknik di Lokasi yang sama.

Sampai pada tahun 1965, Unlam didanai oleh Yayasan. Setelah tahun 1965 Yayasan tidak lagi mendanai Unlam, dikarenakan mengalami masalah keuangan. Kemudian Unlam diambil alih oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.

Dalam perkembangannya hingga sekarang ini (2014), Universitas Lambung Mangkurat memiliki 10 Fakultas dan 1 Program Pascasarjana, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, Fakultas Perikanan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Program Pascasarjana.

Secara implisit oleh para pendirinya, Unlam dicita-citakan menjadi faktor penggerak pembangunan (*agent of development*) di kawasan Kalimantan, baik dari konsepsi/ wawasan pembangunan maupun penyedia sumber daya manusia. Dengan cita-cita tersebut maka Universitas Lambung Mangkurat tidak terpisahkan dari hasrat masyarakat Kalimantan untuk pembangunan Pulau Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indonesia, agar segala potensi yang dimiliki pulau ini dapat menjadi sumber kemakmuran bangsa. Berdasar hal tersebutlah maka Unlam dapat dikatakan sebagai “Universitas Perjuangan”.

Rektor merupakan pimpinan lembaga perguruan tinggi, sebagaimana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2009. Rektor adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi melalui pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal kepada hal layak luas.

Pada tahun 1950-an dipakai istilah Presiden Universitas untuk menyebut pemimpin Universitas. Namun Presiden RI saat itu, Soekarno, merasa keberatan karena menurutnya hanya ada satu Presiden di Indonesia, yakni Presiden RI sehingga kemudian istilah yang dipakai secara umum adalah Rektor.

Daftar Pimpinan Unlam, sejak dari berdirinya sampai dengan sekarang :

No	Nama	Dari	Sampai	Keterangan
1	Letkol. H. Hasan Basry	1960	1963	
2	Milono	1963	1967	
3	Drs. H.A.A Malik	1967	1971	
4	Prof. Anwari Dilmy	1971	1979	
5	Prof. H. M. Kustan Basri	1979	1987	
6	Prof. Ir. H. Supardi	1987	1996	
7	Prof. Ir. H. Yus'a Anward, MS	6 Februari	24 Mei 1996	
8	Prof. H. Alfian Noor	24 Mei 1996	8 Maret 1997	Pejabat sementara
		2001	2005	
9	Prof. Ir. H. Muhammad Rasmadi, MS	2005	2010	
10	Prof. Dr. Ir. Yusuf Sudo Hadi, M. Agr	2010	2010	Penjabat sementara
11	Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ruslan, MS	2010	2014	

Universitas Lambung Mangkurat memiliki 10 Fakultas, yaitu:

- Fakultas Pendidikan
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Teknik
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
- Fakultas Kehutanan
- Fakultas Perikanan
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Selain Fakultas Universitas Lambung Mangkurat juga memiliki 13 program Pascasarjana, yaitu :

- Program Magister Manajemen Pendidikan
- Program Magister Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah
- Program Magister Ilmu Hukum
- Program Magister Manajemen
- Program Magister Administrasi Publik
- Program Magister Teknik Sipil
- Program Magister Agronomi
- Program Magister Ilmu Kehutanan
- Program Magister Ekonomi Pertanian
- Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
- Program Magister Ekonomi Pembangunan
- Program Magister Ilmu Perikanan
- Program Magister Sains Administrasi Pembangunan

Panji

Universitas Lambung Mangkurat memiliki panji berbentuk bendera yang di tengah-tengah bendera tersebut terdapat lambang Universitas Lambung Mangkurat dengan warna dasar kuning (untuk tingkat Universitas). Pembuat sekaligus penjahit Panji Universitas Lambung Mangkurat dilakukan oleh Hj. Aniah, istri dari salah satu perdiri Unlam Prof. H. Abdoel Rivai. Dikarenakan usia Panji ini sudah cukup tua dan dinilai sangat bersejarah, maka akhirnya diabadikan di salah satu museum yang ada di Kalimantan Selatan, yakni di Museum Lambung Mangkurat di Kota Banjarbaru sebagai salah satu arsip daerah Kalimantan Selatan. Setiap Fakultas yang terdapat di Universitas Lambung Mangkurat memiliki warna panji yang berbeda-beda, yaitu:

- Kuning dan Ungu untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Merah Tua untuk Fakultas Hukum
- Biru muda untuk Fakultas Ekonomi
- Jingga (orange) untuk Fakultas Teknik
- Biru muda dan Hijau Tua untuk Fakultas Pertanian
- Biru muda, biru laut dan biru tua untuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
- Ungu dan Hijau Muda untuk Fakultas Kehutanan
- Hijau untuk Fakultas Kedokteran
- Putih untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Jaket Almamater

Jaket almamater Unlam yang memiliki warna dasar kuning dengan gambar lambang Unlam yang terpasang di dada sebelah kiri serta disebelah kanan memuat tulisan yang bersangkutan

Unit Kegiatan Mahasiswa, di tingkat Universitas adalah:

- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unlam (dulu, Badan Eksekutif Dewan Mahasiswa (BE DE MA) Unlam)
- Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) (Unlam) (dulu, Badan Eksekutif Dewan Mahasiswa (BE DE MA) Unlam)
- Racana Hasanuddin HM (Putera) dan Ratu Zaleha (Puteri), merupakan bagian dari organisasi Pramuka
- Korps Suka Rela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unlam
- Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Kompas Borneo
- Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Kinday (dulu, Lembaga Penerbitan dan Pers Mahasiswa (LPPM) Kinday)
- Koperasi Mahasiswa (Kopma) Unlam
- Resimen Mahasiswa Suryanata satuan 601/Nagarunting.
Sedangkan UKM yang terdapat pada Fakultas adalah:
- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seperti BEM FKIP, BEM FH, BEM Fekon, BEM FISIP, BEM FT, BEM Faperta, BEM Fahutan, BEM Fapeerikan, BEM FK dan BEM FMIPA
- Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) seperti BLM FKIP, BLM FH, BLM FE, BLM FISIP, BLM FAPERTA, BLM FAPERTA, BLM Faperikan, BEM FK dan BEM FMIPA
- Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) seperti Mapala Impas-B, Mapala Justitia, Mapala Wira Economica, Mapala Sylva dan mapala Piranha.

Unit Pelaksana Teknis

- UPT Perpustakaan
- UPT P3AI
- UPT Badan Penjamin Mutu
- UPT Pengembang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- UPT Laboratorium Bahasa
- UPT Pusat Studi Korea
- UPT MKU

- UPT Sumber Belajar
- UPT Bantuan Hukum, yakni bernama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum disingkat LKBH Unlam
- UPT P4